



# PEMERINTAH KOTA BATAM INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3  
Raja Isa Nomor 17 Kel. Belian Kec. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Telp. (0778) 4  
Email: inspektoratbatam@gmail.com  
BATAM



Kode Pos 29464

Nomor : 063/700.1.2.7/VI/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan  
SAKIP T.A. 2022

Batam, 13 Juni 2023

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Batam  
di -  
Batam

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Batam Nomor 700.1.2.7/026/VI/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tim Monitoring Inspektorat Daerah Kota Batam telah melaksanakan Monitoring Pelaksanaan SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tanggal 08 s.d. 29 Mei 2023.

Berdasarkan hasil Monitoring Pelaksanaan SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan keberhasilan yang dicapai antara lain :

1. Pelaksanaan SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dinilai telah dilaksanakan dengan memadai.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam telah menyusun dokumen perencanaan kinerja baik untuk tingkatan unit sampai dengan tingkatan individu.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam telah melakukan pengukuran kinerja untuk eselon II namun belum melakukan pengukuran kinerja unit sampai dengan Eselon IV.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam belum menyusun pelaporan kinerja sesuai standar.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara sistematis.

Namun demikian, berdasarkan monitoring lebih lanjut masih ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil Monitoring atas keberadaan dan kualitas dokumen pada komponen Pengukuran Kinerja masih ditemukan kondisi :
  - a. Belum melampirkan pedoman teknis pengukuran kinerja tingkat kota.
  - b. Belum melampirkan Dokumentasi Rapat Pembahasan Pencapaian Kinerja
2. Hasil Monitoring atas keberadaan dan kualitas dokumen pada komponen Pelaporan Kinerja masih ditemukan kondisi :
  - a. Belum melampirkan tanda terima/surat pengantar penyerahan dokumen ke bagian organisasi (lihat lampiran II pada permenpan No 53 Tahun 2014 Tentang Juknis Penyusunan Laporan Kinerja).
  - b. Belum melampirkan bukti hasil verifikasi data akuntabilitas kinerja yang tercantum dalam LKjIP.
  - c. Belum melampirkan bukti dukung bahwa Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian Kinerja.
3. Hasil Monitoring atas keberadaan dan kualitas dokumen pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih ditemukan kondisi :
  - a. Belum melampirkan juknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan SOP pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal Kecamatan Batam Kota
  - b. Belum melampirkan Pengukuran Kinerja Internal mulai dari tingkat Eselon III sampai Staf.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam direkomendasikan agar :

1. Menginstruksikan Tim Pelaksana SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam untuk melengkapi kekurangan dokumentasi bukti dukung atau memperbaiki dokumentasi bukti dukung sebelum dilaksanakan Evaluasi AKIP oleh Evaluator Inspektorat Daerah Kota Batam.
2. Menginstruksikan Tim Pelaksana SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam melakukan koordinasi terkait contoh, format dan standar bukti dukung pada setiap komponen dengan koordinator masing-masing pokja pada Tim SAKIP Kota Batam.

Monitoring ini dilakukan terbatas pada kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Adapun keabsahan dan kebenaran dokumen yang disampaikan merupakan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Demikian disampaikan, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Inspektur Daerah Kota Batam,

Hendriana Gustini, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680824 199008 2 001

Tembusan :

1. Wali Kota Batam
2. Wakil Wali Kota Batam
3. Sekretaris Daerah Kota Batam





# PEMERINTAH KOTA BATAM INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Dinas Bersama Lantai 3  
Jalan Raja Isa Nomor 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota Telp. (0778) 4160801  
Email: inspektoratbatam@gmail.com  
BATAM



Kode Pos 29464

## BERITA ACARA

### PEMBAHASAN HASIL MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Inspektorat Daerah Kota Batam telah dilakukan Pembahasan Hasil Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara Tim Monitoring Inspektorat Daerah Kota Batam dengan wakil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dinilai telah dilaksanakan secara memadai. Namun masih terdapat penerapan SAKIP yang belum didukung dengan bukti yang lengkap dan memadai.
2. Tim Monitoring telah menyampaikan simpulan hasil Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan memberikan penjelasan seperlunya kepada perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam atas materi permasalahan berupa kekurangan bukti dukung dan/atau kesalahan pencantuman bukti dukung. Terkait contoh, format dan standar bukti dukung pada setiap komponen agar dapat dikordinasikan dengan koordinator masing-masing pokja pada Tim SAKIP Kota Batam.
3. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Monitoring Inspektorat Daerah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sependapat terhadap seluruh materi sebagaimana diuraikan dalam simpulan hasil monitoring (terlampir).

Demikianlah Berita Acara pembahasan ini, kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Monitoring Inspektorat Daerah Kota Batam dengan perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana tersebut diatas.

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kota Batam**



Abd. Malik, S.E., M.Si

NIP. 19660727 199603 1 003

**Tim Monitoring**

Yayak Dahlia, S.H., M.H

NIP. 19750215 200502 2 005

Jumadi, S.E

NIP. 19790223 200212 1 003

Dina Fidi Hati Yanti, S.Psi

NIP. 19770813 200502 2 008

Rizka Sari, S.E

NIP. 19861114 201001 2 009

Renita Dian Afrida P, S.E

NIP. 19850421 201001 2 014

Masdi Tapri, S.E

NIP. 19661231 200801 1 032

Bob Vages, S.T

NIP. 19730513 2006-4 1 008

Taufik Akbar, S.E

NIP. 19851029 201001 1 006

Dina Sulastri, S.E

NIP. 19810111 201212 2 001

Valery Sundana, S.H

NIP. 19880606 2015-3 1 007

Belva Alhalim. S.T

NIP. 19871218 202203 1 001

Resti Ayu Mustikasari. S.Ak

NIP. 19910921 202203 2 001

Bagus Triantoro Wibowo, S.T

NIP. 19920813 202203 1 001

Alif Masara, S.Kom

NIP. 19921018 202203 1 001

Susi Lapenia Br. Tarigan, S.Ak

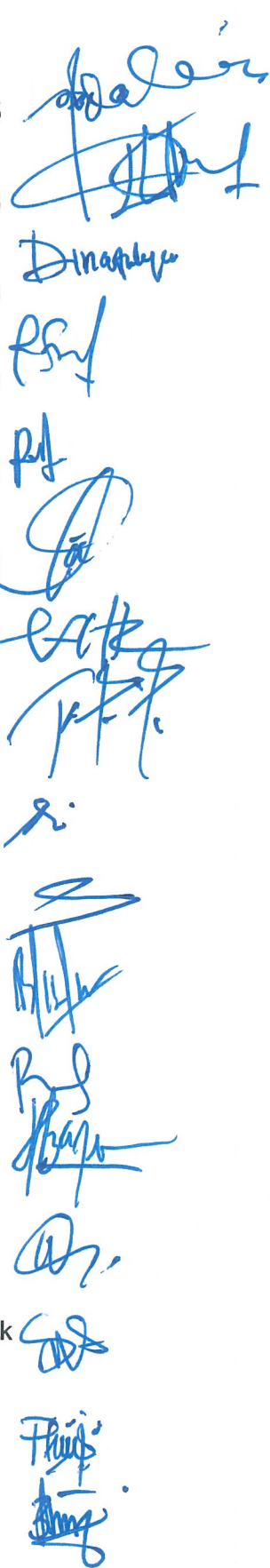
NIP. 19930224 202203 2 003

Finny Anggraeni, S.Akun

NIP. 19940614 202203 1 001

Eka Nova Lasmaria S.S.Kom

NIP. 19960727 202203 2 001





**LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**

**(O P D)**

<b>Nama Satuan Kerja</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam</b>
<b>Nama Kepala Satuan Kerja</b>	<b>Abd. Malik, S.E, M.Si</b>

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Pemenuhan Data Dukung		Catatan Monitoring	Daftar Evidence
			Ceklist	Status		
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30.00</b>				
<b>1.a</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</b>	<b>6.00</b>				
<b>Kriteria:</b>						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Pedoman tingkat pusat Pemendagri No. 86 Tahun 2017 2. Sudah melampirkan Pedoman tingkat daerah Perwako No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Daerah 3. Sudah melampirkan pedoman tingkat OPD berupa SOP Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja; SOP ttg Penyusunan Renstra dan Renja; SOP Penyusunan Laporan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1. Renstra 2021-2026 (beserta perubahan) 2. Perubahan renja (murni 2022 dan perubahan 2022) 3. Pedoman teknis tingkat pusat, daerah, kepala opd dan SOP
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah ada melampirkan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Batam 2005 - 2025	RPJPD 2005-2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Perda Kota Batam No. 7 Tahun 2021 tentang RPJMN Kota Batam 2021 - 2026 2. Sudah melampirkan Renstra BPKAD Tahun Anggaran 2021 - 2026 (Per Desember 2021)	RPJMD Renstra OPD
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan Renja BPKAD Tahun Anggaran 2022 dan Renja BPKAD Tahun Anggaran 2023	Renja 2022 Renja 2023
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Renaksi namun formatnya belum sesuai dengan Perwako No. 7 Tahun 2023 2. Sudah melampirkan Perjanjian Kinerja namun hanya PK Eselon II	Renaksi PK
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan berkas DPPA TA 2022 2. Sudah melampirkan RKA Tahun 2022 3. Sudah melampirkan RKA Perubahan Tahun 2022 4. Belum melampirkan Tabel keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja, RKA, DPA TA 2022 5. Belum melampirkan Tabel keselarasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja Perubahan, RKA Perubahan, DPPA TA 2022	1. RKA, RKA Perubahan dan DPPA 2. Tabel keselarasan
<b>1.b</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</b>	<b>9.00</b>				
<b>Kriteria:</b>						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan Renja Perubahan Tahun 2022	Renja Renja Perubahan (Perwako)
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan Screenshot Web Menpan dan OPD	Screenshot Web Menpan dan OPD
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melengkapi Tabel Kesesuaian Pohon Kinerja dengan Renstra	1. Pohon Kinerja 2. Cascading 3. Dokumen Perencanaan 4. Tabel Kesesuaian Pohon Kinerja dengan Renstra
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan IKU dan PK	IKU dan PK

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Pemenuhan Data Dukung		Catatan Monitoring	Daftar Evidence
			Ceklist	Status		
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan IKU dan Renstra	1. Renstra 2. IKU 2022
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Renstra 2. Sudah melampirkan Renja 3. Sudah melampirkan IKU 4. Sudah melampirkan Matriks Keselarasan Renstra OPD	1. Renstra 2. Renja 3. IKU 2022 4. Matriks Keselarasan Renstra OPD
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan IKU	IKU
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Perjanjian Kinerja 2022 2. Sudah melampirkan Cascading	1. Perjanjian Kinerja 2022 2. Cascading
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Pohon Kinerja 2. Sudah melampirkan SK Probis Tahun 2022	1. Pohon Kinerja 2. SK PROBIS 2022 dan 2023
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Renja 2022 2. Sudah melampirkan Perjanjian Kinerja 2022 Eselon II	Renja 2022 Perjanjian Kinerja 2022 Eselon II
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Perjanjian Kinerja 2022 Eselon II 2. Sudah melampirkan SKP 2022 sampai level fungsional sample 1 bidang (Sekretariat)	SKP 2022 Jabatan Fungsional (Sampel 1 Bidang )
2	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	30.00				
2.a	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	6.00				
<b>Kriteria:</b>						
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		<input type="checkbox"/>	FALSE	1. Sudah melampirkan Permenpan 53 Tahun 2014 2. Belum melampirkan kebijakan tingkat kota tentang pedoman pengukuran kinerja 3. sudah melampirkan SOP SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja; SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal; SOP Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja; SOP ttg Penyusunan Renstra dan Renja; SOP Penyusunan Laporan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Permenpan 53 Tahun 2014 Perwako Nomor 7 Tahun 2023 ttg Perjanjian Kinerja SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal SOP Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja; SOP ttg Penyusunan Renstra dan Renja; SOP Penyusunan Laporan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan IKU 2022 dan telah terdapat penjelasan / formulasi perhitungan indikatornya beserta Definisi Operasional	IKU 2022
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan SOP pengukuran kinerja 2. Sudah melampirkan SOP pengumpulan data kinerja 3. Sudah melampirkan SK penanggung jawab pengumpulan data kinerja	1. SOP pengukuran kinerja 2. SOP pengumpulan data kinerja 3. SK penanggung jawab pengumpulan data kinerja
2.b	<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	9.00				
<b>Kriteria:</b>						
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Belum melampirkan Notulen dan Dokumentasi Rapat Pengukuran Kinerja serta bukti revidi berjenjang laporan pengukuran kinerja berkala (bisa berbentuk hierarki atau tercantum pembahasannya didalam notulen rapat)	Notulen dan Dokumentasi Rapat Pengukuran Kinerja
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Renstra, Renja dan Pengukuran Kinerja 2. sudah melampirkan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, tapi sudah melampirkan SOP Pengukuran Kinerja	1. Renstra 2. Renja 3. SOP Mekanisme Pengumpulan Data 4. SOP Pengukuran Kinerja 5. Pengukuran Kinerja Berkala



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Pemenuhan Data Dukung		Catatan Monitoring	Daftar Evidence
			Ceklist	Status		
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, dan SOP Pengukuran Kinerja 2. Sudah melampirkan Pengukuran Kinerja Triwulan	1. Renstra 2. Renja 3. SOP Mekanisme Pengumpulan Data 4. SOP Pengukuran Kinerja 5. Pengukuran Kinerja Berkala
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan Pengukuran Kinerja Berkala, namun yang dilampirkan baru triwulan 4	Pengukuran Kinerja Triwulan
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Belum melampirkan notulen dan dokumentasi rapat Pengukuran Kinerja Per Bidang	Notulen dan dokumentasi rapat Pengukuran Kinerja Per Bidang
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Telah melampirkan google sheet pengumpulan data kinerja karena belum ada menggunakan aplikasi	Google sheet pengumpulan ata kinerja
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan SS e-gov	Tampilan e-gov
3	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	15.00				
3.a	<b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan</b>	3.00				
<b>Kriteria:</b>						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan LKJIP TA 2022	LKJIP 2022
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan LKJIP TA 2022 dan TA 2021.	LKJIP TA 2021 & 2022
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan LKJIP TA 2022, yang sudah di formalkan/ditandatangani	LKJIP TA 2022
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan paraf hirarki LKJIP sebagai bukti telah direviu atasan langsung	Lampirkan paraf hirarki LKJIP sebagai bukti telah direviu atasan langsung
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan Screenshot web menpan dan OPD.	Screenshot web menpan dan OPD
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Belum melampirkan tanda terima/surat pengantar penyerahan dokumen ke bagian organisasi (lihat lampiran II pada pembenan No 53 Tahun 2014 Tentang Juknis Penyusunan Laporan Kinerja)	
3.b	<b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar</b>	4.50				
<b>Kriteria:</b>						
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		<input type="checkbox"/>	FALSE	1. Sudah melampirkan Permenpan No 53 Tahun 2014 sebagai standar LKJIP (belum ada kebijakan tingkat kota maupun SOP) 2. Belum melampirkan bukti hasil verifikasi data akuntabilitas kinerja yang tercantum dalam LKJIP	PerMen PAN dan RB 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Jika LKJIP telah disusun sesuai dengan pembenan No 53 Tahun 2014 berarti sudah oke. LKJIP belum mengungkap Tabel target 5 tahunan; realisasi tahun sebelumnya; keberhasilan/kegagalan serta upaya/hambatan; efisiensi penggunaan sumber daya; upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Jika LKJIP telah disusun sesuai dengan pembenan No 53 Tahun 2014 berarti sudah oke.	Laporan Kinerja OPD (LKJIP disandingkan dengan Renja)
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Jika LKJIP telah disusun sesuai dengan pembenan No 53 Tahun 2014 berarti sudah oke. LKJIP belum menyajikan tabel target 5 tahunan	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Jika LKJIP telah disusun sesuai dengan pembenan No 53 Tahun 2014 berarti sudah oke. LKJIP belum menyajikan Tabel realisasi tahun2 sebelumnya	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Jika LKJIP telah disusun sesuai dengan pembenan No 53 Tahun 2014 berarti sudah oke. LKJIP belum mengungkap keberhasilan/kegagalan serta upaya/hambatan	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Jika LKJIP telah disusun sesuai dengan pembenan No 53 Tahun 2014 berarti sudah oke. LKJIP belum mengungkap efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Pemenuhan Data Dukung		Catatan Monitoring	Daftar Evidence
			Ceklist	Status		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		<input type="checkbox"/>	FALSE	Jika LKJIP telah disusun sesuai dengan permenpan No 53 Tahun 2014 berarti sudah oke. LKJIP belum mengungkap upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	
4	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	25.00				
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00				
<b>Kriteria:</b>						
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 2 SK Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP 3. Sudah melampirkan Perwako Nomor 51 Tahun 2022 4. Sudah melampirkan SOP Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal OPD	1. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 2 SK Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP 3. Perwako Nomor 51 Tahun 2022 4. SOP Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal OPD
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dari tingkat eselon II sampai staf (berupa tabel pengukuran kinerja triwulan)	PK 2022 Kepala Dinas
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dari tingkat eselon II sampai staf (berupa tabel pengukuran kinerja triwulan)	- Pengukuran Kinerja Triwulan - SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja - SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50				
<b>Kriteria:</b>						
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	1. Sudah melampirkan Permenpan No 88 Tahun 2021 dan Perwako Nomor 51 Tahun 2022 sebagai standar evaluasi akuntabilitas kinerja internal 2. Sudah ada SOP OPD	- ANJAB - SK Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja - SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	Sudah melampirkan SK Tim Evaluasi AKIP OPD	SK Tim Evaluasi AKIP OPD
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		<input type="checkbox"/>	FALSE	Sudah melampirkan hasil pengukuran kinerja triwulan eselon II namun belum melampirkan hasil evaluasi AKIP untuk eselon III s.d staff	Pengukuran kinerja berkala
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		<input checked="" type="checkbox"/>	TRUE	- Belum terdapat laporan hasil evaluasi - Sudah melampirkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal tingkat eselon II (berupa tabel pengukuran kinerja triwulan) - Sudah melampirkan tabel realisasi program/kegiatan/anggaran	nota dinas kepada atasan perihal laporan hasil evaluasi internal. Terlampir PK dan realisasi program/kegiatan/anggaran
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		<input type="checkbox"/>	FALSE	Penggunaan Teknologi Informasi pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan hanya sebatas penggunaan excel dan word, belum menggunakan aplikasi tersendiri.	
<b>Kesimpulan Hasil Monitoring:</b>						
Pelaksanaan SAKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dilaksanakan secara memadai namun masih terdapat penerapan SAKIP yang belum didukung dengan bukti yang lengkap. Sehingga disarankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melengkapi dokumentasi sebagaimana yang disarankan oleh Tim Monitoring Inspektorat menjelang pelaksanaan Evaluasi AKIP. Terkait contoh, format dan standar bukti dukung pada setiap komponen agar dapat dikordinasikan dengan koordinator masing-masing pokja pada Tim SAKIP Kota Batam.						